

# **LAMPIRAN I**

Matriks Kinerja dan Pendanaan  
Kementrian/Lembaga  
(Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

Matrik Kerangka Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Renstra KPPU 2020 - 2024

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kedeputian KPPU													
Sasaran Strategis (SS-1)	Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan efektivitas advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi												
Indikator Kinerja SS-1	1	Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1-7)	4.5	4.7	4.7	4.9	5.0						
	2	Prosentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku	80%	85%	90%	95%	100%						
<b>Program Teknis : Program Pengawasan Persaingan Usaha</b>													
Sasaran Program	1	Terpenuhinya kualitas advokasi kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah yang lebih baik											
Indikator Kinerja Program	1.1	Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai UU Nomor 5/1999	3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7						Direktorat Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan
	1.2	Indeks kepatuhan pelaku usaha didalam menjalankan kemitraan sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013	3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7						Direktorat Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan
Sasaran Program	2	Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha											
Indikator Kinerja Program	2.1	Persentase jumlah klarifikasi laporan dan Laporan Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti ke Tahap Penyelidikan	19%	21%	23%	25%	27%						Dit. Investigasi
	2.2	Persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti pelaku usaha	100%	100%	100%	100%	100%						Dit. Merger dan Akuisi
	2.3	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui surat peringatan I, II dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan	50%	75%	80%	90%	95%						Dit. Pengawasan Kemitraan
	2.4	Persentase banding/Kasasi di Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti	80%	80%	85%	90%	100%						Dit. Penindakan
	2.5	Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU	90%	90%	90%	90%	90%						
	2.6	Indeks Layanan Kepaniteraan	3 skala 7	3.25 skala 7	3.5 skala 7	3.75 skala 7	4 skala 7						Kepaniteraan
Output Program	Advokasi dan Pengawasan Persaingan Usaha												
Indikator Output Program	-	Jumlah Advokasi Persaingan usaha, kemitraan dan modul persaingan usaha	31	32	34	36	38						Deputi Kajian & Advokasi
	-	Jumlah persidangan majelis/penanganan perkara	24	25	27	28	30						Deputi Penegakan Hukum





Matrik Kerangka Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Renstra KPPU 2020 - 2024

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kedeputian KPPU													
Sasaran Strategis (SS-1)	Terwujudnya kepastian hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat												
Indikator Kinerja SS-1	1 Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1-7)		4.5	4.7	4.7	4.9	5.0						
	2 Prosentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku		80%	85%	90%	95%	100%						
<b>Program Teknis : Program Pengawasan Persaingan Usaha</b>													
Sasaran Program	1 Terpuhinya kualitas advokasi kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah yang lebih baik												
Indikator Kinerja Program	1.2 Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai UU Nomor 5/1999		3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7						Dit Advokasi Persaingan Usaha & Kemitraan
	1.2 Indeks kepatuhan pelaku usaha didalam menjalankan kemitraan sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013		3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7						Dit Advokasi Persaingan Usaha & Kemitraan
Sasaran Program	2 Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha												
Indikator Kinerja Program	2.1 Prosentase jumlah klarifikasi laporan dan Laporan Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti ke Tahap Penyelidikan		19%	21%	23%	25%	27%						Dit. Investigasi
	2.2 Persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti pelaku usaha		100%	100%	100%	100%	100%						Dit. Merger dan Akuisi
	2.3 Prosentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui surat peringatan I, II dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan		50%	75%	80%	90%	95%						Dit. Pengawasan Kemitraan
	2.4 Prosentase banding/Kasasi di Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti		80%	80%	85%	90%	100%						Dit. Penindakan
	2.5 Prosentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU		90%	90%	90%	90%	90%						Kepaniteraan
	2.6 Indeks Layanan Kepaniteraan		3 skala 7	3.25 skala 7	3.5 skala 7	3.75 skala 7	4 skala 7						
Output Program	Advokasi dan Pengawasan Persaingan Usaha												
Indikator Output Program	- Jumlah Advokasi Persaingan usaha, kemitraan dan modul persaingan usaha		31	32	34	36	38						Deputi Kajian & Advokasi
	- Jumlah persidangan majelis/penanganan perkara		24	25	27	28	30						Deputi Penegakan Hukum

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Kegiatan 4. Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat</b>		Pusat											
Sasaran Kegiatan 4.1.	Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Investigasi terhadap Pelaku Usaha atau Kegiatan Usaha												
Indikator Kinerja Kegiatan 4.1	- Prosentase laporan klarifikasi dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan		18%	19%	20%	21%	22%	7,300	7,300	7,200	7,300	7,500	Direktorat Investigasi
	- Prosentase hasil penelitian inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan		19%	21%	23%	25%	27%						
	- Prosentase hasil laporan penyelidikan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang ditindaklanjuti ke tahap pemberkasan		29%	30%	30%	31%	31%						
Output Kegiatan	Investigasi terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat												
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah laporan klarifikasi pelanggaran persaingan usaha yang diselesaikan		60	74	86	99	111						
	- Jumlah laporan hasil penelitian perkara inisiatif pelanggaran persaingan usaha		5	6	7	7	8						
	- Jumlah laporan hasil penyelidikan terkait dugaan pelanggaran persaingan usaha		35	37	44	51	58						
Komponen Kegiatan	a Klarifikasi Laporan Pelanggaran Persaingan Usaha												
	b Penelitian Perkara Inisiatif												
	c Penyelidikan Pelanggaran Persaingan Usaha												
<b>Kegiatan 5. Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat</b>		Pusat											
Sasaran Kegiatan 5	Terpenuhinya pelaksanaan penindakan pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat												
Indikator Kinerja Kegiatan 5	- Prosentase pemberkasan dugaan pelanggaran usaha yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%	3,700	9,000	9,400	9,900	10,200	Direktorat Penindakan
	- Prosentase penyelesaian penuntutan dugaan pelanggaran pada Pemeriksaan/Sidang Majelis Komisi		100%	100%	100%	100%	100%						
	- Persentase dikuatkannya Putusan KPPU di tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan tahun berjalan		62%	62%	63%	63%	64%						
Output Kegiatan 5.1	Pemberkasan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat												
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah Pemberkasan Perkara Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat		22	25	25	30	30						
Komponen Kegiatan	a. Melakukan Pemberkasan Perkara Persaingan Usaha												
Output Kegiatan 5.2	Penuntutan Perkara Dugaan Pelanggaran pada Pemeriksaan/Sidang Majelis Komisi												
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah Penuntutan Perkara Dugaan Pelanggaran pada Pemeriksaan/Sidang Majelis Komisi		1	19	21	23	25						
Komponen Kegiatan	a. Melakukan Penuntutan Perkara Dugaan Pelanggaran pada Pemeriksaan/Sidang Majelis Komisi												
Output Kegiatan 5.1.3	Litigasi/Penanganan Upaya Hukum terhadap Putusan KPPU												
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah Laporan Litigasi/Penanganan Upaya Hukum terhadap Putusan KPPU pada tingkat Pengadilan Negeri/Kasasi/Peninjauan Kembali		10	12	14	16	18						







Matrik Kerangka Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Renstra KPPU 2020 - 2024

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Kantor Wilayah KPPU</b>													
Sasaran Strategis (SS-1)	Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan efektivitas advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi												
Indikator Kinerja SS-1	1 Tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip UU Nomor 5 Tahun 1999 (Indeks Persepsi Persaingan Usaha, skala 1-7)		4.5	4.7	4.7	4.9	5.0						
	2 Prosentase penyelesaian proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku		80%	85%	90%	95%	100%						
Sasaran Strategis (SS-2)	Terwujudnya tata kelola kelembagaan KPPU melalui e-government												
Indikator Kinerja SS-2	- Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan e-government (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1-100)		75	78	79	80	90						
<b>Program Teknis : Program Pengawasan Persaingan Usaha</b>													
Sasaran Program	1 <b>Terpenuhinya kualitas advokasi kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah yang lebih baik</b>												
Indikator Kinerja Program	1.1 Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai UU Nomor 5/1999		3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7					Dit Advokasi Persaingan Usaha & Kemitraan	
	1.2 Indeks kepatuhan pelaku usaha didalam menjalankan kemitraan sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013		3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7					Dit Advokasi Persaingan Usaha & Kemitraan	
Sasaran Program	2 <b>Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha</b>												
Indikator Kinerja Program	2.1 Prosentase jumlah klarifikasi laporan dan Laporan Hasil Penelitian yang ditindaklanjuti ke Tahap Penyelidikan		19%	21%	23%	25%	27%					Dit. Investigasi	
	2.2 Persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti pelaku usaha		100%	100%	100%	100%	100%						
	2.3 Prosentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui surat peringatan I, II dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan		50%	75%	80%	90%	95%					Dit. Merger dan Akuisi	
	2.4 Prosentase banding/Kasasi di Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti		80%	80%	85%	90%	100%					Dit. Pengawasan Kemitraan	
	2.5 Prosentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU		90%	90%	90%	90%	90%					Dit. Penindakan	
	2.6 Indeks Layanan Kepaniteraan		3 skala 7	3.25 skala 7	3.5 skala 7	3.75 skala 7	4 skala 7					Kepaniteraan	

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Program Generik : Dukungan Manajemen</b>													
Sasaran Program	1. <b>Penguatan Sumber Daya Manusia KPPU</b>												
Indikator Kinerja Program	1.1 Indeks Kompetensi dan Integritas KPPU (skala 1-100)		60	62	64	66	68						
	1.2 Prosentase lulusan diklat persaingan usaha berbasis kompetensi dengan nilai Baik		80%	80%	85%	85%	90%						
	1.3 Rasio penerapan tata kelola majemen perubahan SDM berbasis e-government		1 dari 5	2 dari 5	3 dari 5	4 dari 5	5 dari 5						
Sasaran Program	2 <b>Terwujudnya Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi</b>												
Indikator Kinerja Program	2.1 Prosentase peningkatan penyiapan instrument reformasi birokrasi		85	85	85	85	85						
	2.2 Indeks layanan umum operasional teknis internal		4.2 skala 7	4.7 skala 7	5.0 skala 7	5.3 skala 7	5.5 skala 7						
	2.3 Indeks layanan ketatausahaan dan operasional pimpinan		4.2 skala 7	4.7 skala 7	5.0 skala 7	5.3 skala 7	5.5 skala 7						
	2.4 Indeks Keamanan Informasi (skala 1-645)		200	230	260	290	320						
	2.5 Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas layanan kehumasan dan pengembangan kerjasama		3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7						
	2.6 Indeks Layanan Hukum		3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7						
	2.7 Tingkat Maturitas SPIP		3 dari skala 5	3 dari skala 5	3 dari skala 5	4 dari skala 5	4 dari skala 5						
	2.8 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPPU		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
Output Program	Advokasi dan Pengawasan Persaingan Usaha												
Indikator Output Program	- Jumlah Advokasi Persaingan usaha, kemitraan dan modul persaingan usaha		31	32	34	36	38					Deputi Kajian & Advokasi	
	- Jumlah persidangan majelis/penanganan perkara		24	25	27	28	30					Deputi Penegakan Hukum	
Output Program	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha												
Indikator Output Program	- Jumlah penyelenggaraan layanan internal KPPU		15	15	15	15	15						
<b>Kegiatan 9. Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU</b>		Daerah											
Sasaran Kegiatan 9	Terwujudnya Pengawasan Persaingan Usaha di wilayah kerja Kantor Wilayah KPPU												
Indikator Kinerja Kegiatan 9	9.1 Prosentase kajian pengawasan pelaku usaha yang ditindaklanjuti oleh Kanwil		30%	30%	31%	32%	33%						
	9.2 Prosentase laporan hasil klarifikasi laporan/hasil penelitian perkara inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan hasil pengawasan kemitraan di Kanwil yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan/atau ke Tahap Pemeriksaan Pendahuluan Tahap 1		50%	50%	51%	52%	53%						



Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Komponen Kegiatan	Melakukan kajian pengawasan pelaku usaha terkait Kemitraan di Kanwil VI		3	2	2	2	2							
	- Melakukan kajian pengawasan pelaku usaha di Kanwil VI			2	2	3	3							
Output Kegiatan 9.1.2	Rekomendasi Perkara Persaingan di daerah													
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah Laporan yang Telah di Klarifikasi		36	22	26	30	32							Kantor Wilayah KPPU
	- Jumlah Penelitian Inisiatif yang diselesaikan			6	6	6	6							
	- Jumlah Penyelidikan yang telah di selesaikan			12	12	12	12							
Sub-output	a. Kanwil I													
Komponen Kegiatan	- Laporan yang Telah di Klarifikasi		6	5	5	5	5							
	- Penelitian Inisiatif yang diselesaikan			1	1	1	1							
	- Penyelidikan yang telah di selesaikan			2	2	2	2							
Sub-output	b. Kanwil II													
Komponen Kegiatan	- Laporan yang Telah di Klarifikasi		6	4	5	5	4							
	- Penelitian Inisiatif yang diselesaikan			1	1	1	1							
	- Penyelidikan yang telah di selesaikan			2	2	2	2							
Sub-output	c. Kanwil III													
Komponen Kegiatan	- Laporan yang Telah di Klarifikasi		6	4	4	5	4							
	- Penelitian Inisiatif yang diselesaikan			1	1	1	1							
	- Penyelidikan yang telah di selesaikan			2	2	2	2							
Sub-output	d. Kanwil IV													
Komponen Kegiatan	- Laporan yang Telah di Klarifikasi		6	5	5	5	5							
	- Penelitian Inisiatif yang diselesaikan			1	1	1	1							
	- Penyelidikan yang telah di selesaikan			2	2	2	2							
Sub-output	e. Kanwil V													
Komponen Kegiatan	- Laporan yang Telah di Klarifikasi		6	4	5	5	4							
	- Penelitian Inisiatif yang diselesaikan			1	1	1	1							
	- Penyelidikan yang telah di selesaikan			2	2	2	2							
Sub-output	f. Kanwil VI													
Komponen Kegiatan	- Laporan yang Telah di Klarifikasi		6	4	4	5	5							
	- Penelitian Inisiatif yang diselesaikan			1	1	1	1							
	- Penyelidikan yang telah di selesaikan			2	2	2	2							
Output Kegiatan 9.1.3	Harmonisasi Kebijakan Persaingan di Daerah													
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah harmonisasi terhadap peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah		3	18	18	30	36							Kantor Wilayah KPPU
Sub-output	a. Kanwil I													
Komponen Kegiatan	- Melakukan harmonisasi terhadap peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah di Kanwil I		3	3	3	5	6							
	- Jumlah Assistensi/Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan di daerah		4	4	5	5	6							
Sub-output	b. Kanwil II													
Komponen Kegiatan	- Melakukan harmonisasi terhadap peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah di Kanwil II		3	3	3	5	6							

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Jumlah Assistensi/Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan di daerah		4	4	5	5	6							
Sub-output	c. Kanwil III													
Komponen Kegiatan	- Melakukan harmonisasi terhadap peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah di Kanwil III		3	3	3	5	6							
	- Jumlah Assistensi/Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan di daerah		4	4	5	5	6							
Sub-output	d. Kanwil IV													
Komponen Kegiatan	- Melakukan harmonisasi terhadap peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah di Kanwil IV		3	3	3	5	6							
	- Melakukan Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan di Kanwil IV		4	4	5	5	6							
Sub-output	e. Kanwil V													
Komponen Kegiatan	- Melakukan harmonisasi terhadap peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah di Kanwil V		3	3	3	5	6							
	- Jumlah Assistensi/Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan di daerah		4	4	5	5	6							
Sub-output	f. Kanwil VI													
Komponen Kegiatan	- Melakukan harmonisasi terhadap peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah di Kanwil VI		3	3	3	5	6							
	- Jumlah Assistensi/Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan di daerah		4	4	5	5	6							
Output Kegiatan 9.1.4	Terpenuhinya Penyelenggaraan Penguatan Kelembagaan di daerah													
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah Koordinasi dan Implementasi MoU		18	24	24	30	30							
	- Jumlah laporan forum jurnalis		36	24	24	24	24							
	- Jumlah kegiatan dukungan manajemen		12	6	12	12	12							
	- Jumlah pendampingan bantuan hukum dan eksekusi		6	6	6	6	6							
Sub-output	a. Kanwil I													
Komponen Kegiatan	- Melakukan Koordinasi dan Implementasi MoU		3	4	4	5	5							
	- Melakukan forum jurnalis		6	4	4	4	4							
	- Melakukan kegiatan dukungan manajemen		2	1	2	2	2							
	- Melakukan pendampingan bantuan hukum dan eksekusi		1	1	1	1	1							
Sub-output	b. Kanwil II													
Komponen Kegiatan	- Melakukan Koordinasi dan Implementasi MoU		3	4	4	5	5							
	- Melakukan forum jurnalis		6	4	4	4	4							
	- Melakukan kegiatan dukungan manajemen		2	1	2	2	2							
	- Melakukan pendampingan bantuan hukum dan eksekusi		1	1	1	1	1							
Sub-output	c. Kanwil III													
Komponen Kegiatan	- Melakukan Koordinasi dan Implementasi MoU		3	4	4	5	5							Kantor Wilayah KPPU
	- Melakukan forum jurnalis		6	4	4	4	4							
	- Melakukan kegiatan dukungan manajemen		2	1	2	2	2							
	- Melakukan pendampingan bantuan hukum dan eksekusi		1	1	1	1	1							
Sub-output	d. Kanwil IV													
Komponen Kegiatan	- Melakukan Koordinasi dan Implementasi MoU		3	4	4	5	5							
	- Melakukan forum jurnalis		6	4	4	4	4							



Matrik Kerangka Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Renstra KPPU 2020 - 2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>SEKRETARIAT JENDERAL KPPU</b>													
Sasaran Strategis (SS-2)	Terwujudnya kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal melalui e-government												
Indikator Kinerja SS-2	- Indeks Tingkat efektivitas pemanfaatan e-government (Percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu dan keamanan data, skala 1-100)		75	78	79	80	90						
<b>Program Generik : Dukungan Manajemen</b>													
Sasaran Program	1. <b>Penguatan Sumber Daya Manusia KPPU</b>												
Indikator Kinerja Program	1.1 Indeks Kompetensi dan Integritas KPPU (skala 1-100)		60	62	64	66	68						Bagian SDM (Biro SDM & Umum)
	1.2 Prosentase lulusan diklat persaingan usaha berbasis kompetensi dengan nilai Baik		80%	80%	85%	85%	90%						Unit Diklat
	1.3 Rasio penerapan tata kelola majemen perubahan SDM berbasis e-government		1 dari 5	2 dari 5	3 dari 5	4 dari 5	5 dari 5						Bagian SDM (Biro SDM & Umum)
Sasaran Program	2. <b>Terwujudnya Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi</b>												
Indikator Kinerja Program	2.1 Prosentase peningkatan penyiapan instrument reformasi birokrasi		85	85	85	85	85						Bagian SDM (Biro SDM & Umum)
	2.2 Indeks layanan umum operasional teknis internal		4.2 skala 7	4.7 skala 7	5.0 skala 7	5.3 skala 7	5.5 skala 7						Bagian Umum (Biro SDM & Umum)
	2.3 Indeks layanan ketatausahaan dan operasional pimpinan		4.2 skala 7	4.7 skala 7	5.0 skala 7	5.3 skala 7	5.5 skala 7						Bagian Tata Usaha(Biro SDM & Umum)
	2.4 Indeks Keamanan Informasi (skala 1-645)		200	230	260	290	320						Unit Data & Informasi
	2.5 Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas layanan kehumasan dan pengembangan kerjasama		3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7						Biro Humas & Kerjasama
	2.6 Indeks Layanan Hukum		3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7						Biro Hukum
	2.7 Tingkat Maturitas SPIP		3 dari skala 5	3 dari skala 5	3 dari skala 5	4 dari skala 5	4 dari skala 5						Satuan Pengawas Internal
	2.8 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPPU		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						Biro Perencanaan dan Keuangan
Output Program	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha												
Indikator Output Program	- Jumlah penyelenggaraan layanan internal KPPU		15	15	15	15	15						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Kegiatan 1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum</b>													
Sasaran Kegiatan 1.1.	Terpenuhinya kualitas pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia												
Indikator Kinerja Kegiatan 1.1	- Indeks kepuasan layanan Bagian Sumber Daya Manusia		4 dari skala 7	4.1 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.3 dari skala 7	4.4 dari skala 7	5,600	5,869	6,753	9,848	10,150	Biro SDM & Umum
	- Jumlah kebijakan (Perkom) perencanaan SDM		1	1	1	1	1						
	- Persentase pegawai yang telah memenuhi standar hard competency dan soft competency		55	56	57	58	60						
	- Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan		55	56	57	58	60						
	- Presentase Penilaian Kinerja pegawai dengan nilai minimal BAIK		80	82	84	85	88						
	- Indeks pemahaman pegawai mengenai peraturan Sumber Daya Manusia		4 dari skala 7	4.1 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.3 dari skala 7	4.4 dari skala 7						
Output Kegiatan	Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)												
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah kebijakan perencanaan SDM		1	1	1	1	1						
	- Indeks kepuasan layanan Bagian Sumber Daya Manusia		4 dari skala 7	4.1 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.3 dari skala 7	4.4 dari skala 7						
	- Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan		55	56	57	58	60						
	- Persentase pegawai yang telah memenuhi standar hard competency dan soft competency		55	56	57	58	60						
Komponen Kegiatan	a Perencanaan dan pengembangan SDM (perencanaan dan pengembangan SDM, rekrutmen dan pengangkatan pegawai, pengembangan pegawai, pemberhentian pegawai)												
	b Administrasi pegawai (administrasi kepegawaian, pembinaan kepegawaian, pemantuan dan penilaian kinerja pegawai, penyusunan laporan kepegawaian)												
	c Pengelolaan kesejahteraan pegawai (pengelolaan kesejahteraan kerja dan aspek pegawai, pelaksanaan kegiatan antar unit kerja terkait layanan SDM)												
Sasaran Kegiatan 1.2	Meningkatnya Layanan Manajemen Barang Milik Negara												
Indikator Kinerja Kegiatan 1.2	- Prosentase utilisasi aset K/L		80	81	82	83	85	908	1,354	1,438	1,571	1,636	Biro SDM & Umum
	- Indeks ketepatan waktu penyusunan RKBMN		4.2 skala 7	4.7 skala 7	5.0 skala 7	5.3 skala 7	5.5 skala 7						
Output Kegiatan	Layanan Manajemen Barang Milik Negara (BMN)												
Indikator Output Kegiatan	- Prosentase utilisasi aset K/L		80	81	82	83	85						
	- Indeks ketepatan waktu penyusunan RKBMN		4.2 skala 7	4.7 skala 7	5.0 skala 7	5.3 skala 7	5.5 skala 7						
Komponen Kegiatan	a Penatausahaan BMN												
	b Penghapusan BMN												
	c Monitoring BMN												
	d Penyusunan Laporan BMN												
Sasaran Kegiatan 1.3	Terwujudnya layanan umum teknis internal												
Indikator Kinerja Kegiatan 1.3	- Nilai indeks kepuasan layanan umum		4.2 skala 7	4.7 skala 7	5.0 skala 7	5.3 skala 7	5.5 skala 7	928	1,935	1,712	1,558	1,832	





Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Komponen Kegiatan	a. Standarisasi dan Sertifikasi													
	b. Pengembangan Kompetensi													
	c. Pelatihan Persaingan Usaha bagi hakim/aparat penegak hukum													
	c. Pelatihan Persaingan Usaha bagi aparat Kementrian/Lembaga/Daerah													
<b>Kegiatan 3. Peningkatan Data dan Informasi</b>														
Sasaran Kegiatan 3.1	Terwujudnya layanan Sistem Data dan Informasi yang efektif													
Indikator Kinerja Kegiatan 3.1	- Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi		3,5 dari skala 5	3,6 dari skala 5	3,7 dari skala 5	3,8 skala 5	3,9 skala 5	880	1,612	2,141	3,247	3,133		
	- Indeks Keamanan Informasi		200	230	260	290	320							
Output Kegiatan	Layanan Data dan Informasi													
Indikator Output Kegiatan	- Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi		3,5 dari skala 5	3,6 dari skala 5	3,7 dari skala 5	3,8 skala 5	3,9 skala 5							
Komponen Kegiatan	a. Manajemen Sistem Informasi													
	b. Pengelohan data dan informasi													
	c. Penyusunan Laporan													
<b>Kegiatan 4. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi</b>														
Sasaran Kegiatan 4.1	Terwujudnya layanan pelaksanaan eksekusi putusan KPPU yang efektif													
Indikator Kinerja Kegiatan 4.1	- Persentase kepatuhan pembayaran denda persaingan usaha		12%	13%	14%	15%	16%	804	887	892	909	925		
	- Persentase Target pelaksanaan Eksekusi kepada terlapor di tahun berjalan		5%	6%	7%	7%	9%							
	- Jumlah upaya pemantauan pelaksanaan putusan ke pihak terkait		20	22	25	25	28							
	- Persentase layanan penerbitan Surat Keterangan Bebas Perkara		100%	100%	100%	100%	100%							
Output Kegiatan	Pelaksanaan Eksekusi Putusan KPPU													
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah kegiatan pelaksanaan eksekusi Putusan KPPU		15	15	16	17	19							
	- Jumlah denda persaingan usaha yang dibayar (Milyar Rp)		12	13	14	15	16							
	- Target Penerbitan Surat Keterangan Bebas Perkara (Rp dalam juta)		1	1	1	1	1							
Komponen Kegiatan	a. Perencanaan pelaksanaan eksekusi													
	b. Koordinasi dan Pelaksanaan eksekusi													
	c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Eksekusi													
	d. Pengelolaan Dokumentasi Kegiatan Eksekusi													
Sasaran Kegiatan 4.2	Terwujudnya layanan bantuan hukum													
Indikator Kinerja Kegiatan 4.2	- Persentase keberhasilan pendampingan hukum		100%	100%	100%	100%	100%	329	443	464	487	507		

Biro Hukum

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Output Kegiatan	Layanan Bantuan Hukum													
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah Pendampingan hukum		6	7	8	9	10							
	- Jumlah Dokumen hukum		1	2	4	6	8							
Komponen Kegiatan	a Perencanaan Bantuan Hukum													
	b Pelaksanaan Bantuan Hukum													
	c Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Hukum													
	d Penyusunan laporan													
Sasaran Kegiatan 4.3	Terwujudnya layanan hukum													
Indikator Kinerja Kegiatan 4.3	- Persentase produk hukum yang disetujui dan/atau ditetapkan		70%	75%	75%	80%	85%	300	2,000	3,000	2,500	2,000		
	- Jumlah verifikasi atas produk hukum		150	160	170	180	190							
Output Kegiatan	Layanan Hukum													
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah Produk hukum (peraturan internal)		1	3	4	3	2							
	- Jumlah Pedoman UU Nomor 5 Tahun 1999		1	2	4	3	2							
	- Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)		5	5	8	10	12							
Komponen Kegiatan	a Koordinasi penyusunan produk hukum													
	b Penyusunan laporan													
<b>Kegiatan 5. Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga</b>														
Sasaran Kegiatan 5.1	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Internasional yang efektif													
Indikator Kinerja Kegiatan 5.1	- Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama internasional		3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7	1,366	4,300	3,000	2,500	2,500		
	- Persentase peningkatan kontribusi lembaga di tingkat internasional		5%	10%	15%	20%	25%							
	- Persentase peningkatan komunikasi dan diseminasi praktek terbaik internasional bagi lembaga		8%	16%	24%	32%	40%							
Output Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Internasional													
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah kegiatan pengelolaan dan pengembangan kerjasama internasional		8	10	10	9	9							
Komponen Kegiatan	a. Pemenuhan komitmen lembaga pada organisasi dan badan internasional													
	b Dukungan Terhadap komitmen pemerintah Indonesia													
Sasaran Kegiatan 5.2	Terpenuhiya penyelenggaraan layanan hubungan masyarakat dan Informasi													
Indikator Kinerja Kegiatan 5.2	- Persentase opini negatif pemberitaan K/L pada media		20%	19%	18%	17%	16%	2,422	2,459	2,394	2,397	2,422		
	- Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas publikasi (skala 1-7)		3.5 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.6 dari skala 7	4.7 dari skala 7							
	- Prosentase ketepatan waktu penyediaan informasi publik		75%	80%	85%	90%	95%							
Output Kegiatan	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi													
Indikator Output Kegiatan	- Persentase opini negatif pemberitaan K/L pada media		20%	19%	18%	17%	16%							
	- Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas publikasi (skala 1-7)		3.5 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.6 dari skala 7	4.7 dari skala 7							

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Prosentase ketepatan waktu penyediaan informasi publik		75%	80%	85%	90%	95%							
Sasaran Kegiatan 5.3	Terpenuhinya Pengelolaan layanan manajemen organisasi													
Indikator Kinerja Kegiatan 5.3	- Survei kepuasan kepada pemangku kepentingan atas pengembangan kerjasama domestik		3.75 dari skala 7	4.0 dari skala 7	4.2 dari skala 7	4.5 dari skala 7	4.7 dari skala 7	1,970	1,748	1,701	1,703	1,721		
Output Kegiatan	Layanan Manajemen Organisasi													
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah laporan kegiatan kerjasama lembaga tingkat nasional		4	5	6	7	8							
Komponen Kegiatan	a. Melaksanakan Fasilitasi dan Implementasi Hubungan Kerja Sama Dalam Negeri													
	b. Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama													
<b>Kegiatan 6. Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU</b>														
Sasaran Kegiatan 6.1	Terwujudnya layanan audit internal													
Indikator Kinerja Kegiatan 6.1	- Prosentase Jumlah Rekomendasi atas hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti		70	75	80	85	90	1,224	1,324	1,324	1,424	1,424		
	- Nilai hasil telaah seawat		60	60	60	70	70							
	- Nilai Internal Audit Capability Model		2	2	3	3	3							
Output Kegiatan	Layanan Audit Internal													
Indikator Output Kegiatan	- Prosentase Jumlah Rekomendasi atas hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti		70	75	80	85	90							
	- Nilai hasil telaah seawat		60	60	60	70	70							
	- Nilai Internal Audit Capability Model		2	2	3	3	3							
Komponen Kegiatan	a. Penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan internal													
	b. Pelaksanaan audit internal													
	c. Tindak lanjut hasil laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)													
	d. Reviu perencanaan anggaran													
	e. Pembinaan pengawasan kinerja dan keuangan													
	f. Koordinasi pengawasan internal													
	g. Penyusunan laporan													
<b>Kegiatan 7. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU</b>														
Sasaran Kegiatan 7.1	Terwujudnya layanan perencanaan													
Indikator Kinerja Kegiatan 7.1	- Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		5	5	5	5	5	817	1,100	950	1,137	1,600		
Output Kegiatan	Layanan Perencanaan													
Indikator Output Kegiatan	- Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		5	5	5	5	5							
Komponen Kegiatan	a. Penyusunan Rencana Kerja													
	b. Penyelarasan Kegiatan dan Revisi anggaran													
	c. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran													
	d. Penyusunan Laporan													

SPI



## **LAMPIRAN II**

Matriks Kerangka Regulasi  
(Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

**MATRIK KERANGKA REGULASI  
RENSTRA KPPU 2020 – 2024**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Pemerintah tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.	<p>a. Amanat RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>b. Karena mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• seleksi dan pengangkatan Anggota KPPU;</li> <li>• masa jabatan Anggota KPPU;</li> <li>• organisasi dan tata kerja di lingkungan KPPU yang meliputi Sekretariat Jenderal;</li> <li>• Manajemen SDM KPPU. Pokok pikiran dalam pengaturan ini adalah terkait transformasi kelembagaan KPPU dan transformasi kepegawaian Sekretariat KPPU.</li> <li>• ketentuan mengenai Anggaran KPPU.</li> </ul> <p>c. Memberikan manfaat terhadap Kelembagaan KPPU.</p> <p>d. Berdampak pada status Pejabat dan Pegawai Sekretariat KPPU</p>	Biro Hukum Biro SDM dan Umum	Kemenpan RB Kemenkumham	N+1 setelah pengesahan Amandemen UU No.5/1999

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
2	Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan Saham, Pengambilalihan Aset atau Pembentukan Usaha Patungan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	<p>a. Amanat RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>b. Karena mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ketentuan mengenai penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagai <i>threshold</i> kewajiban notifikasi Merger di KPPU.</li> <li>• ketentuan tata cara pemberitahuan.</li> <li>• menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang saat ini menggunakan post merger notifikasi yang bertentangan dengan ketentuan dalam RUU yaitu pre merger notifikasi.</li> </ul> <p>c. Manfaat terhadap Kelembagaan KPPU.</p>	Biro Hukum Direktorat Merger dan Akuisisi	BKPM Kemenkumham Kemendag	N+1 setelah pengesahan Amandemen UU No.5/1999



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		d. Berdampak pada status Pejabat dan Pegawai Sekretariat KPPU			
3	Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penanganan Perkara dan Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Persaingan Usaha.	<p>a. Amanat RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>b. Karena mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tata beracara penanganan perkara persaingan usaha (non Merger).</li> <li>• tata beracara penilaian Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan Saham, Pengambilalihan Aset atau Pembentukan Usaha Patungan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</li> <li>• tata beracara penanganan perkara Kemitraan</li> <li>• pengaturan lebih lanjut tentang pengenaan sanksi administratif</li> </ul>	Biro Hukum Direktorat Penindakan	MA Kemenkumham	N+1 setelah pengesahan Amandemen UU No.5/1999

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>pelanggaran persaingan usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengaturan lebih lanjut tentang leniensi (pengurangan sanksi administratif).</li> </ul> <p>c. Manfaat kepada Pelaku Usaha dan <i>stakeholder</i> terkait kepastian proses beracara di KPPU.</p> <p>d. Berdampak pada pelayanan publik KPPU dalam proses beracara di KPPU</p>			
4	Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Sistem dan Tata Cara Pelaporan Terhadap Rencana Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan Saham, Pengambilalihan Aset Atau Pembentukan Usaha Patungan.	<p>a. Amanat RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>b. Karena mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tata cara pelaporan (SOP).</li> <li>• formulir notifikasi.</li> <li>• dokumen pendukung yang dipersyaratkan.</li> <li>• tata cara penilaian penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, atau pembentukan usaha patungan.</li> </ul> <p>c. Manfaat kepada Pelaku Usaha dan <i>stakeholder</i> terkait proses penggabungan atau</p>	Biro Hukum Direktorat Merger dan Akuisisi	BKPM Kemenkumham Kemendag	N+1 setelah pengesahan Amandemen UU No.5/1999

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, atau pembentukan usaha patungan yang dilakukan oleh KPPU.</p> <p>d. Berdampak pada pelayanan publik KPPU dalam rangka persetujuan atas rencana Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan Saham, Pengambilalihan Aset atau Pembentukan Usaha Patungan.</p>			
5	Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.	<p>a. Amanat RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>b. Rapat Komisi sebagai instrument pengambilan keputusan tertinggi dan kebijakan strategis di lingkungan KPPU dan Peraturan KPPU mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tata cara Rapat Komisi.</li> <li>• jumlah Anggota KPPU yang hadir sebagai <i>quorum</i>.</li> <li>• mekanisme pengambilan keputusan.</li> <li>• produk Rapat Komisi.</li> </ul>	Biro Hukum Biro SDM dan Umum	Kemenpan RB Kemenkumham	N+1 setelah pengesahan Amandemen UU No.5/1999

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>c. Manfaat kepada Masyarakat dan publik terhadap keputusan dan kebijakan strategis KPPU.</p> <p>d. Berdampak pada pelayanan publik KPPU dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU untuk mencapai tujuan Undang-Undang.</p>			
6	Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Kode Etik dan Tata Cara Penegakan Kode Etik Komisi Pengawas Persaingan Usaha.	<p>a. Amanat RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>b. Dalam Peraturan Komisi tersebut akan mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengaturan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan, dan pengungkapan informasi.</li> <li>• pengaturan lebih lanjut mengenai penegakan kode etik KPPU.</li> <li>• pengaturan tentang pembentukan Majelis Kehormatan.</li> <li>• tata beracara sidang Majelis Kehormatan.</li> </ul> <p>c. Manfaat kepada Masyarakat dan publik terhadap penegakan kode etik di KPPU.</p>	Biro Hukum Biro SDM dan Umum	Kemenpan RB Kemenkumham	N+1 setelah pengesahan Amandemen UU No.5/1999

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Eksisting, Kajian dan Penelitian</b>	<b>Unit Penanggungjawab</b>	<b>Unit Terkait/Institusi</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
		d. Berdampak pada pelayanan publik KPPU dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU untuk mencapai tujuan Undang-Undang.			